



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah gambaran arah kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, 04 Desember 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. RIDUWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19740306 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	12
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2. Isu Strategis	47
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
3.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	61
3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	62
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	62
3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	65
3.5. Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	68
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
4.1. Urusan Program	72
4.2. Urusan Kegiatan	73
4.3. Urusan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target, dan Pagu Indikatif.	107
4.4. Urusan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.	116
4.5. Target Pencapaian Keberhasilan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	124
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029, merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 15 ayat 1 Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

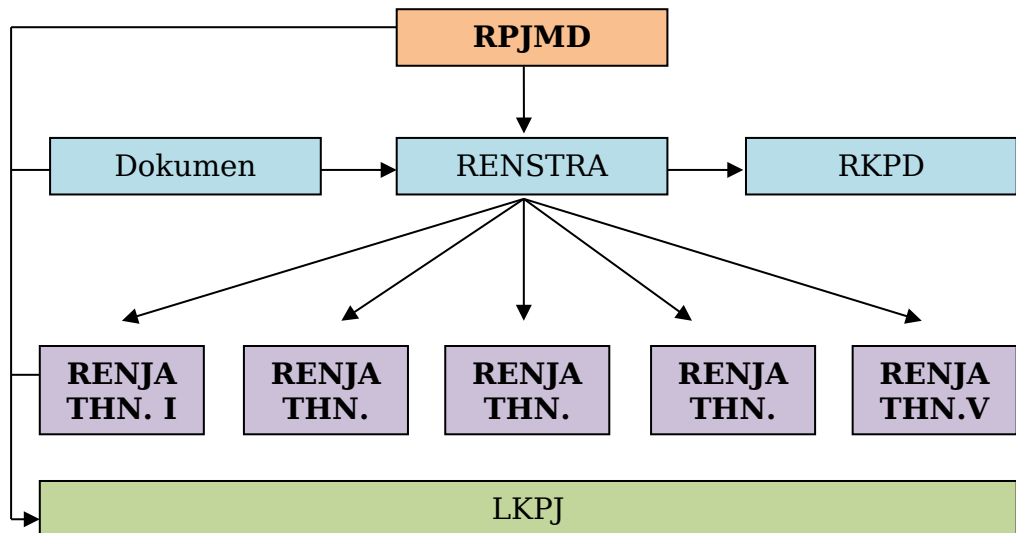
Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan

daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (***strengths***), kelemahan (***weakness***), peluang (***opportunities***) dan ancaman (***threats***) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu - isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turuZnan/penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah

kemungkinan besar tidak akan dapat mencapainya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);

- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 20) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
- 28) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3).
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- 33) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 ini guna penyempurnaan tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai dengan tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu Renstra disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

1.3.2. Tujuan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025-2029;

3. Sebagai acuan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2029 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Menjelaskan latar belakang penyusunan, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Tahun 2025-2029

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran umum perangkat daerah mengenai tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan dan permasalahan dan isu strategis daerah perangkat daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah serta arah kebijakan perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi daftar program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1.1.1.1. Tugas Pokok

- a. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan,

pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibiidang Prasarana dan Sarana.
- e. Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibiidang peternakan

- g. Bidang Penyuluhan, pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.
- h. Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

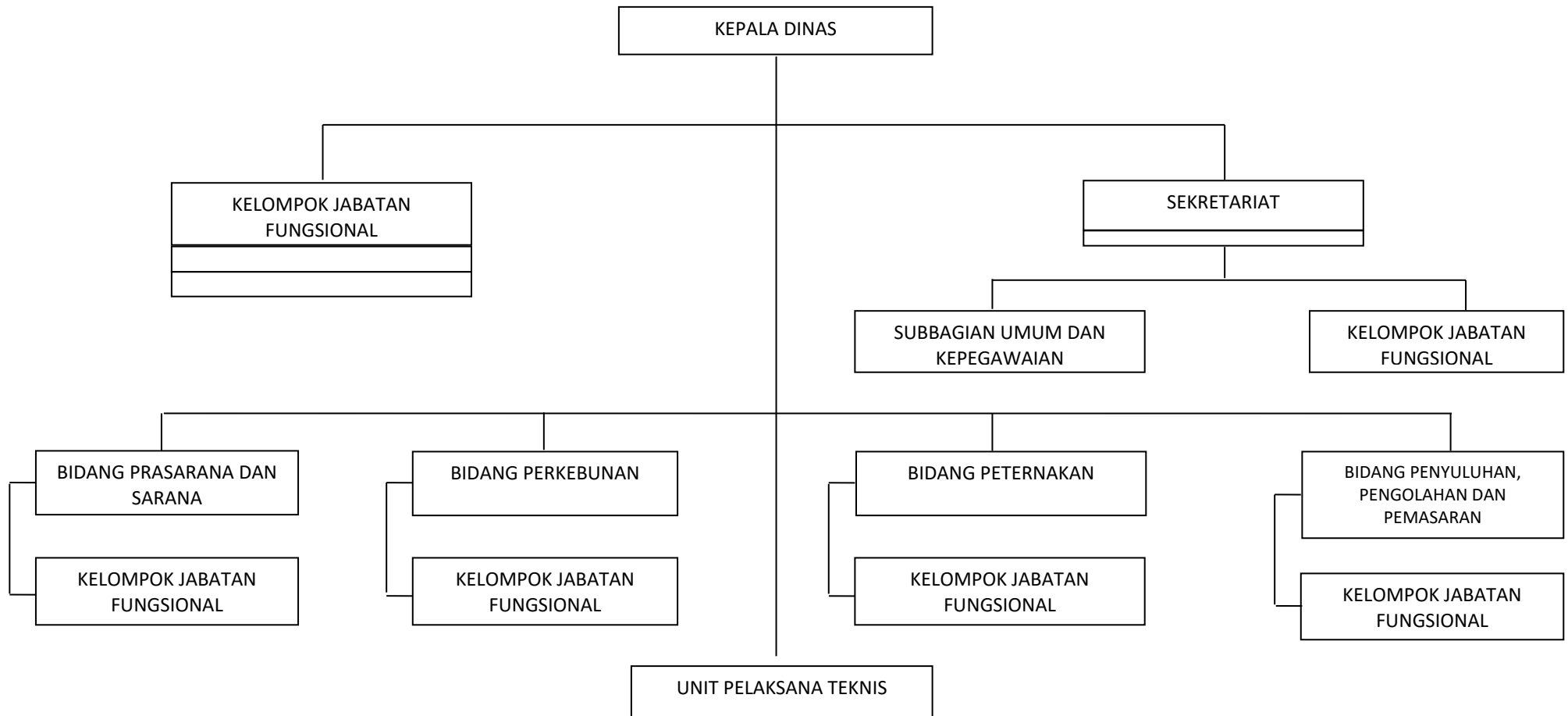
2.1.1.3. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

- a. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- (1). Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan.

(2). Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Bidang Prasarana dan Sarana

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang prasarana dan sarana;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Perkebunan

- (1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan Organisme Penganggu Tanaman (OPT), bimbingan kelembagaan

- Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT), pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak,

penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaian ternak;

- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan dan peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**Tabel : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan
Pternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	8
2.	III	19
3.	II	4
4.	I	-

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

**Tabel : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan
Pternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	PNS	TKK	JUMLAH
1.	Sekretariat	9	11	20
2.	Bidang Perkebunan	4	5	9
3.	Bidang Pternakan	9	6	15
4.	Bidang Prasarana dan Sarana	4	5	9
5.	Bidang Penyuluhan	3	5	8
6.	UPT Perlindungan Tanaman	1	1	2
7.	UPT Puskeswan dan IB	1	-	1
	JUMLAH	31	33	64

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

**Tabel : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan
Pternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	1
2.	S1	26

3.	D3	0
4.	D2	0
5.	D1	0
6.	SLTA	4
7.	SLTP	0
8.	SD	0

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

**Tabel : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
A.	Struktural	
	Eselon II.b	1
	Eselon III.a	1
	Eselon III.b	4
	Eselon IV.a	1
	Eselon IV.b	2
B.	Fungsional	
	Fungsional	13
C.	Pelaksana	9
	JUMLAH	31 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

2.1.2.1 Unit Pelayanan Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,
Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 2 (dua) Unit

Pelayanan Teknis (UPT) yaitu UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kecamatan Tungkal Ilir dan UPT Puskesmas dan IB di Kecamatan Tungkal Ulu. Selain adanya UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai Pos Keswan dan IB.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos keswan, 7 petugas Medis dan 7 petugas para medis yang tersebar di masing-masing Kecamatan.

Tabel : Jumlah Petugas Medis dan Paramedis Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Puskesmas	Wilayah Unit Kerja	Petugas Medis	Petugas Para Medis	KET
1	Tungkal Ilir	Kec. Tungkal Ilir Kec. Bram Itam Kec. Seberang Kota	2	1	Medis PNS, Para Medis Honorar.
2	Betara	Kec. Betara Kec. Kuala Betara	1	1	Medis PNS, Para Medis Honorar.
3	Pengabuan	Kec. Pengabuan Kec. Senyerang	1	1	Medis PNS, Para Medis Honorar.
4	Merlung	Kec. Merlung Kec. Muara Papalik Kec. Renah Mendaluh	1	2	Petugas Medis dan Para Medis Honorar.
5	Tungkal Ulu	Kec. Tungkal Ulu Kec. Batang Asam Kec. Tebing Tinggi	2	2	Petugas Medis dan Para Medis Honorar.

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

Dilihat dari jangkauan lokasi dan medan yang cukup berat jumlah petugas medis dan paramedis masih sangat minim. Untuk optimalnya masing - masing Kecamatan mempunyai 1 (satu) unit pos keswan dan 1 (satu) orang petugas medis dan dibantu 2 (dua) orang petugas paramedis.

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas maupun kuantitas.

Jumlah Pos IB di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 9 unit dengan petugas IB sebanyak 14 orang, petugas PKB 12 orang dan petugas ATR 4 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan. Namun karena adanya keterbatasan SDM sehingga Petugas IB merangkap juga sebagai Petugas PKB dan ATR seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR	KET
1	TUNGKAL ILIR	1	1	-	-
2	BRAM ITAM	1	1	1	
3	SEBERANG KOTA	-	-	-	
4	BETARA	1	1	-	
5	KUALA BETARA	-	-	-	
6	PENGABUAN	1	1	-	PNS
7	SENYERANG	4	3	1	PNS IB 1 Org, PKB 1 org
8	TUNGKAL ULU	2	1	2	

9	TEBING TINGGI	1	3	-	
10	MUARA PAPALIK	1	1	-	
11	BATANG ASAM	1	-	-	
12	MERLUNG	1	1	-	
13	RENAH MENDALUH	-	-	-	
TOTAL		14	12	4	

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk Sarana dan Prasarana serta Perlengkapan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan **Desember 2024** sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel : Klasifikasi Aset
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Jenis Klasifikasi Aset		Saldo Per - 31 Desember 2024
I	ASET TETAP		12.607.835.911,71,-
	1	Tanah	1.119.218.300,-
	2	Peralatan dan Mesin	3.433.392.686,-
	3	Gedung dan Bangunan	6.737.272.862,01,-
	4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.118.592.859,-
	5	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
II	ASET TETAP LAINNYA		199.359.204,70,-
III	ASET LAINNYA		2.573.706.605,-
TOTAL ASET			15.380.901.721,4-

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yaitu “Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Harmonis, Mandiri dan Berinovasi.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, antara lain :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 yang terkait dengan tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah pada misi ke-2 dan misi ke-3. Misi ke-2 yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan misi ke-3 yaitu Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi dan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan produksi komoditi perkebunan
2. Meningkatkan populasi ternak

Hasil pengukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2021 - 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (ton)												
	- Kelapa Sawit	121.136	123.074	125.166	127.419	124.460	145.538	152.563	153.292	103,97	118,25	121,88	122,72
	- Karet	3.833	3.848	3.867	3.890	3.256	3.111	3.028	2.752	92,38	80,85	78,3	72,72
	- Kelapa Dalam	55.050	55.490	55.989	56.549	55.147	54.081	54.265	55.224	101,39	97,46	96,92	97,62
	- Kopi	1.189	1.194	1.200	1.207	1.160	1.144	1.140	1.128	97,56	95,81	95	93,37
	- Pinang	10.557	10.663	10.780	10.909	12.072	13.876	13.933	14.047	81,47	130,08	129,25	128,72
2.	Jumlah Populasi Ternak (ekor)												
	- Sapi	9.086	9.267	9.452	9.641	9.021	9.151	5.793	6.448	99,47	98,75	62,23	66,88
	- Kerbau	744	758	773	788	741	748	291	314	98,25	98,68	39,97	39,85
	- Kambing	48.216	49.180	50.163	51.166	47.757	48.010	7.729	7.839	97,03	97,62	15,41	15,32
	- Domba	829	845	861	878	819	819	124	125	97,79	95,74	14,40	14,24
	- Unggas	1.493.393	1.523.260	1.553.260	1.584.799	2.026.947	2.092.871	1.199.145	1.010.238	99,52	137,39	67,20	64,55

Data Statistik Perkebunan Tahun 2021 - 2024

TAHUN	KOMODITI	LUAS LAHAN (Ha)				PRODUKS I (TON)	PRODUKTIVITA S (Kg/Ha/Thn)	JUMLAH PETANI (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
2021	Kelapa sawit	22.172	55.043	7.771	84.986	124.460	2.261	27.057
	Kelapa dalam	5.544	41.205	8.632	55.381	55.147	1.338	21.292
	Karet	1.317	6.111	235	7.663	3.256	533	3.862
	Pinang	2.945	8.352	228	11.525	12.072	1.445	8.305
	Kopi	611	1.998	367	2.976	1.160	581	2.532
2022	Kelapa sawit	22.702	58.276	6.786	87.764	145.538	2.497	32.150
	Kelapa dalam	4.408	40.223	6.960	51.591	54.081	1.345	19.915
	Karet	1.265	5.909	214	7.388	3.111	526	3.704
	Pinang	3.824	9.617	204	13.645	13.876	1.443	9.343
	Kopi	553	1.988	320	2.861	1.144	575	2.441
2023	Kelapa sawit	22.797	58.646	6.716	88.159	152.563	2.601	32.397
	Kelapa dalam	4.015	40.275	7.154	51.444	54.265	1.347	19.903
	Karet	1.073	5.740	263	7.076	3.028	528	3.512
	Pinang	3.970	9.644	237	13.851	13.933	1.445	9.414
	Kopi	424	2.017	403	2.844	1.140	565	2.432
2024	Kelapa sawit	23.309	58.807	6.509	88.625	153.292	2.607	32.684
	Kelapa dalam	3.704	40.508	7.215	51.427	55.224	1.363	19.894
	Karet	1.031	5.489	239	6.759	2.752	501	3.369
	Pinang	3.922	9.690	232	13.844	14.047	1.446	9.407
	Kopi	399	2.033	413	2.843	1.128	555	2.432

Data Statistik Peternakan Tahun 2021 - 2024

TAHUN	KOMODITI	POPULASI (Ekor)	PRODUKSI DAGING (Kg)
2021	Sapi	9.021	201.989
	Kerbau	741	9.665
	Kambing	47.757	4.071
	Domba	819	0
	Unggas	2.026.947	5.387.879
2022	Sapi	9.151	251.038
	Kerbau	748	6.747
	Kambing	48.010	11.782
	Domba	809	55
	Unggas	2.092.871	897.607
2023	Sapi	5.793	298.944
	Kerbau	291	21.033
	Kambing	7.729	38.188
	Domba	124	558
	Unggas	1.199.145	690.485
2024	Sapi	6.448	376.748
	Kerbau	314	4.287
	Kambing	7.839	28.826
	Domba	125	317
	Unggas	1.010.238	1.119.323

Ket : Data Tahun 2024 merupakan Data ASEM 2024

**Tabel : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021 - 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.506.867.036.-	7.084.933.514.-	5.789.426.977.-	6.755.114.072.-	5.400.334.197.-	5.669.644.870.-	5.382.436.507.-	6.272.270.920.-	0,72	0,80.	0,93	0,93		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.147.296.-	156.149.690.-	151.308.300.-	179.582.100.-	267.394.246.-	156.149.690.-	150.058.230.-	165.762.000.-	0,99	1	0,99,	0,89		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.604.311.-	35.004.314.-	32.531.100.-	41.450.100.-	40.654.311.-	35.004.314.-	31.281.230.-	34.825.000.-	0,98	1	0,96.	0,84		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	79.674.643.-	0.-	0'-	0.-	79.674.643.-	0.-	0.-	0.-	1	0.-	0.-	0.-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.868.342.-	121.145.376.-	118.777.000.-	138.132.000.-	147.065.292.-	121.145.376.-	118.777.000.-	130.937.000.-	0,98	1	1	0,95		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.105.177.-	5.323.892.001.-	4.260.977.027.-	4.700.768.372.-	4.311.819.740.-	3.980.934.432.-	3.914.142.816.-	4.338.245.396.-	0,72	0,87	0,92	0,93		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.806.545.177.-	5.139.752.001.-	4.055.177.027.-	4.481.408.372.-	4.125.259.740.-	3.796.794.432.-	3.708.342.816.-	4.132.325.396.-	0,71	0,74	0,91	0,92		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.560.000.-	184.140.000.-	205.800.000.-	219.360.000.-	186.560.000.-	184.140.000.-	205.800.000.-	205.920.000.-	1	1	1	0,94		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.319.200.-	38.319.200.-	50.450.000.-	67.600.000.-	37.886.200.-	38.124.060.-	50.450.000.-	65.370.000.-	0,99	0,99.	1	0,97		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.319.200.-	38.319.200.-	50.450.000.-	67.600.000.-	37.886.200.-	38.124.060.-	50.450.000.-	65.370.000.-	0,99	0,99	1	0,97		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.439.241.-	720.279.884.-	590.473.450.-	708.131.700.-	318.398.369.-	707.442.820.-	569.836.250.-	655.947.122.-	0,86	0,98.	0,86	0,86		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.667.331.-	3.524.310.-	5.765.000.-	5.898.000.-	7.667.331.-	3.524.310.-	4.553.700.-	4.253.500.-	1	1	0,79	0,72		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.097.510.-	72.427.824.-	68.177.000.-	84.066.000.-	66.097.510.-	72.427.824.-	60.445.500.-	79.153.000.-	1	1	0,89	0,94		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.320.000.-	19.320.000.-	23.520.000.-	46.495.000.-	18.970.000.-	19.160.000.-	21.650.000.-	45.630.000.-	0,98	0,99	0,92	0,98		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.780.400.-	16.676.900.-	23.719.700.-	41.742.500.-	25.780.400.-	16.676.900.-	16.108.500.-	25.337.700.-	1	1	0,68	0,60		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000.-	8.000.000.-	6.000.000.-	5.000.000.-	6.000.000.-	6.045.000.-	6.000.000.-	4.880.000.-	0,83	0,75	1	0,98		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.374.000.-	600.285.850.-	463.291.750.-	524.930.200.-	193.883.128.-	589.563.786.-	461.078.550.-	496.692.922.-	0,34	0,98	0,99	0,95		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.-	126.282.000.-	52.297.000.-	92.358.000.-	0.-	125.432.800.-	46.315.000.-	92.143.000.-	0	0,99	0,89	0,99		
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0.-	126.282.000.-	52.297.000.-	72.590.000.-	0.-	125.432.800.-	46.315.000.-	72.375.000.-	0	0,99	0,88	0,99		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.-	0.-	0.-	19.768.000.-	0.-	0.-	0.-	19.768.000.-	0	0	0	1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.018.000.-	126.282.000.-	314.160.000.-	311.546.000.-	180.738.950.-	125.432.800.-	301.502.735.-	302.722.130.-	0,72	0,99	0,96	0,86		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.798.000.-	5.160.000.	3.600.000.-	6.800.000.-	2.365.600.-	5.159.600.-	2.272.000.-	4.939.000.-	0,49.	0,99	0,63	0,73		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.820.000.-	84.220.000.-	75.360.000.-	75.546.000.-	55.973.350.-	65.374.967.-	64.210.737.-	68.763.130.-	0,67	0,78	0,85	0,85		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.400.000.-	142.300.000.-	235.200.000.-	229.200.000.-	123.400.000.-	142.300.000.-	235.200.000.-	229.020.000.-	1	1	1	0,99		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.838.122.-	488.330.739.-	369.761.200.-	695.128.200.-	284.096.692.-	448.726.501.-	350.131.476.-	652.081.272.-	0,96	0,92	0,95	0,95		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.350.000.-	120.150.000.-	157.860.000.-	191.838.000.-	101.933.320.-	107.309.697.-	147.062.967.-	166.217.400.-	0,96	0,89	0,93	0,87		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.150.000.-	145.898.300.-	175.271.200.-	211.470.200.-	136.810.250.-	119.775.160.-	171.476.630.-	194.654.345.-	0,94	0,83	0,98	0,92		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.538.200.-	18.600.000.-	20.910.000.-	20.540.000.-	26.553.200.-	18.600.000.-	16.690.000.-	20.340.000.-	0,93	1	0,80	0,99		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.799.922.-	203.682.439.-	15.720.000.-	271.280.000.-	18.799.922.-	203.041.644.-	14.901.879.-	270.869.527.-	1	0,99.	0,95	0,99		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.393.865.996.-	725.339.928.-	1.222.570.800.-	1.448.894.650.-	1.237.805.341.-	668.171.608.-	1.001.700.736.-	1.321.158.400.-	0,89	0,92	0,82	0,91		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0.-	90.615.000.-	78.665.000.-	538.225.000.-	0.-	87.638.000.-	33.951.350.-	494.025.000.-	0	0,96	0,43	0,92		

Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	0.-	90.615.000.-	78.665.000.-	538.225.000.-	0.-	87.638.000.-	33.951.350.-	494.025.000.-	0	0,97	0,43.	0,92		
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	681.239.250.-	548.014.720.-	606.473.500.-	765.579.650.-	533.930.041.-	495.473.550.-	463.386.766.-	683.628.500.-	0,98.	0,90	0,76	0,92		
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	139.602.500.-	22.775.000.-	41.200.000.-	91.585.000.-	138.103.091.-	22.775.000.-	41.200.000.-	89.335.000.-	0,99	1	1	0,98		
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	293.456.300.-	292.721.220.-	288.433.600.-	377.407.650.-	283.287.950.-	248.112.300.-	284.223.650.-	319.833.500.-	0,97	0,85	0,98	0,85		
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	248.180.450.-	232.518.500.-	276.839.900.-	296.587.000.-	112.539.000.-	224.586.250.-	137.963.116.-	274.460.000.-	0,99	0,97	0,50	0,93		
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	712.626.746.-	86.710.208.-	537.432.300.-	145.090.000.-	703.875.300.-	85.060.358.-	504.362.620.-	143.504.900.-	0,99	0,98	0,94	0,99		
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	712.626.746.-	53.140.000.-	462.931.300.-	110.590.000.-	703.875.300.-	51.530.150.-	441.957.620.-	109.097.900.-	0,99	0,97	0,95	0,99		
Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0.-	33.570.208.-	74.501.000.-	34.500.000.-	0.-	33.530.208.-	62.405.000.-	34.407.000.-	0.-	0,99	0,84	0,99		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	354.230.000.-	3.419.372.704.-	487.938.00.-	4.057.840.698.-	330.527.200.-	3.175.342.329.-	232.508.040.-	1.617.147.300.-	0,93	0,93	0,48	0,40		

Pengembangan Prasarana Pertanian	0.-	0.-	0.-	1.795.926.750.-	0.-	0.-	0.-	603.647.300.-	0	0	0	0,33		
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0.-	0.-	0.-	1.795.926.750.-	0.-	0.-	0.-	603.647.300.-	0	0	0	0,33		
Pembangunan Prasarana Pertanian	354.230.000.-	3.337.273.500.-	403.510.000.-	2.178.663.948.-	330.527.200.-	3.094.418.929.-	150.708.040.-	933.000.000.-	0,93	0,93	0,37	0,65		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0.-	132.350.000.-	39.800.000.-	324.000.000.-	0.-	104.285.150.-	30.342.440.-	308.350.000.-	0.-	0,79	0,76	0,95		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0.-	150.000.000.-	0.-	600.000.000.-	0.-	150.000.000.-	0.-	570.000.000.-	0.-	1	0.-	0,95		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	354.230.000.-	3.054.923.500.-	363.710.000.-	1.254.663.948.-	330.527.200.-	2.840.133.779.-	120.365.600.-	54.650.000.-	0,93	0,93	0,33	0,44		
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.-	82.099.204.-	84.428.000.-	83.250.000.-	0.-	80.923.400.-	81.800.000.-	80.500.000.-	0.-	98,57	96,89	96,70		
Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	0.-	82.099.204.-	84.428.000.-	83.250.000.-	0.-	80.923.400.-	81.800.000.-	80.500.000.-	0.-	0,98	0,97	0,97		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	612.809.285.-	1.207.268.008.-	1.249.177.436.-	1.895.556.091.-	595.790.107.-	1.108.007.815.-	1.023.497.425.-	1.641.963.295.-	0,97	0,92	0,82	0,87		

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	612.809.285.-	1.066.482.968.-	1.192.086.769.-	1.844.198.591.-	595.790.107.-	985.971.425.-	973.606.890.-	1.590.605.796.-	0,97	0,92	0,82	0,82		
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	612.809.285.-	1.066.482.968.-	1.192.086.769.-	1.844.198.591.-	595.790.107.-	985.971.425.-	973.606.890.-	1.590.605.796.-	0,97	0,92	0,82	0,86		
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0.-	140.785.040.-	18.660.000.-	15.464.500.-	0.-	122.036.390.-	18.660.000.-	15.464.500.-	0.-	0,86	1	1		
Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	0.-	140.785.040.-	18.660.000.-	15.464.500.-	0.-	122.036.390.-	18.660.000.-	15.464.500.-	0	0,87	1	1		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.-	0.-	38.430.667.-	35.711.000.-	0.-	0.-	31.230.535.-	35.711.000.-	0	0	0,81	1		
Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	0.-	0.-	38.430.667.-	35.711.000.-	0.-	0.-	31.230.535.-	35.711.000.-	0	0	0,81	1		
Program Pengendalian dan	287.758.622.-	200.772.232.-	353.106.530.-	334.622.930.-	230.068.622.-	189.492.232.-	322.324.366.-	259.033.250.-	0,85	0,94	0,91	0,77		

Penanggulangan Bencana Pertanian														
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	287.758.622.-	200.772.232.-	353.106.530.-	334.622.930.-	230.068.622.-	189.492.232.-	322.324.366.-	259.033.250.-	0,85	0,94	0,91	0,77		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	77.878.622.-	94.922.232.-	110.681.530.-	140.863.530.-	73.533.622.-	94.742.232.-	99.669.366.-	130.413.250.-	0,94	0,99	0,90	0,93		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	133.825.000.-	105.850.000.-	242.425.000.-	193.759.400.-	80.480.000.-	94.750.000.-	222.655.000.-	128.620.000.-	0,60	0,90	0,92	0,66		
Penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	76.055.000.-	0.-	0.-	0.-	76.055.000.-	0.-	0.-	0.-	1	0	0	0		
Program Perizinan Usaha Pertanian	154.649.529.-	145.485.997.-	177.254.800.-	142.780.800.-	131.254.529.-	132.885.997.-	170.814.698.-	131.120.000.-	0,85	0,91	0,96	0,92		
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.649.529.-	145.485.997.-	177.254.800.-	142.780.800.-	131.254.529.-	132.885.997.-	170.814.698.-	131.120.000.-	0,85	0,91	0,96	0,92		
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	154.649.529.-	145.485.997.-	177.254.800.-	142.780.800.-	131.254.529.-	132.885.997.-	170.814.698.-	131.120.000.-	0,85	0,91	0,96	0,92		

Program Penyuluhan Pertanian	167.859.533.-	217.526.183.-	269.222.000.-	235.649.000.-	155.559.533.-	217.526.183.-	269.194.400.-	222.524.000.-	0,93	1	0,99	0,94		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	167.859.533.-	217.526.183.-	269.222.000.-	235.649.000.-	155.559.533.-	217.526.183.-	269.194.400.-	222.524.400.-	0,93	1	0,99	0,93		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	0.-	0.-	51.215.000.-	.0.-	0.-	0.-	51.215.000.-	0.-	0	0	1	0		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	167.859.533.-	153.623.163.-	111.048.500.-	156.014.000.-	155.559.533.-	153.623.163.-	111.020.900.-	150.689.000.-	0,93	1	0,99	0,97		
Penyediaan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	0.-	63.903.020.-	106.958.500.-	79.635.000.-	0.-	63.903.020.-	106.958.500.-	71.835.000.-	0	1	1	0,90		

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan pelayanan untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat pekebun dan peternak pada khususnya. Layanan yang disediakan merupakan layanan bidang perkebunan, peternakan, sarana dan prasarana dan penyuluhan demi mewujudkan kesejahteraan pekebun dan peternak .

Objek kelompok sasaran pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain itu, terdapat objek kelembagaan sasaran pelayanan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dewan Rempah Indonesia, MPIG Pinang dan MPIG Kopi.

Kelompok sasaran layanan yang disediakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : **Kelompok Sasaran Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
1.	Bidang Perkebunan	Kelompok tani atau pekebun, penangkar benih/bibit Perkebunan : - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Perkebunan

		- Penyediaan data informasi perkebunan - Pembangunan prasarana perkebunan - Pengembangan sarana perkebunan - Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan - Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan kebun
2.	Bidang Peternakan	Kelompok tani/peternak, mitra usaha : - Inseminasi Buatan (IB) ternak sapi - Penyediaan jasa medik veteriner - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan - Vaksin PMK - Klinik Pengobatan Hewan Kesayangan - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis - Penyediaan data informasi peternakan
3.	Bidang Sapras	Kelompok tani, pekebun/peternak : - Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana perkebunan seperti Jalan Usaha Tani (Jalan Produksi), Tata Air Mikro (TAM), Seng untuk Lantai Jemur Komoditi Pinang dan Solar Dryer - Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
4.	Bidang Penyuluhan	Kelompok Tani, Gapoktan dan PPL : - Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Pekebun dan Peternak - Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak - Pertemuan Penyuluh dan Asosiasi Petani

5.	UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan	Kelompok tani, pekebun : - Pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman secara hayati
6.	UPTD Keswan	Kelompok tani, peternak : - Pemeriksaan kesehatan hewan - Penyuluhan kesehatan hewan ternak

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan. Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang belum dapat diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah yang erat kaitannya dengan bidang perkebunan dan peternakan agar rencana pembangunan sektor Perkebunan dan peternakan di daerah

yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Pelaksanaan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas selalu dijumpai permasalahan yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Identifikasi permasalahan terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Perkebunan.					
Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : - Kelapa Sawit : 156.381 - Kelapa Dalam : 55.202 - Kopi : 1.127 - Pinang : 14.042 - Karet : 2.829	Akumulasi jumlah produksi semester 1 dan 2 tahun berjalan	a. SDM Petugas Perkebunan rendah b. Minimnya sarana dan prasarana c. Kurangnya Ketersediaan benih/bibit unggul (bersertifikat) d. Banyak tanaman tua/tanaman rusak e. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan	a. Perubahan Iklim b. Bencana alam/ Banjir c. Banyaknya tanggul dilahan perkebunan yang rusak d. Minimnya anggaran	a. SDM pegaawai rendah (belum memahami tugas dan fungsi) b. Kurangnya jumlah pegawai c. Kurangnya SDM Teknis Perkebunan

Bidang Peternakan.					
Jumlah populasi ternak.	Populasi ternak (ekor): - Sapi : 6.448 - Kerbau : 314 - Kambing : 7.839 - Domba : 126 - Unggas : 1.023.044	Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, unggas) pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan - kematian - pengeluaran - pemotongan	a. Masih rendahnya SDM peternak b. Masih tingginya kematian pedet (anak sapi) c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya tenaga medis dan paramedis e. Minimnya ketersediaan HPT Unggul	a. Masih adanya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Minimnya anggaran	a. Minimnya sarana dan prasarana b. SDM pegawai rendah (belum memahami tugas dan fungsi) c. Kurangnya pegawai

Dari Analisa table identifikasi permasalahan diatas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat perncapaian target kinerja perangkat daerah yaitu :

1. Aspek Teknis

- Luas tanaman tua dan rusak (TTM/TR) yang masih belum tertangani dengan baik.
- Belum optimalnya penggunaan benih unggul yang bermutu/bersertifikat.
- Kurangnya indukan betina yang produktif
- Minimnya ketersediaan Hijauan Pakan Ternak unggul/berkualitas.
- Adanya tanggul-tanggul yang rusak dilahan perkebunan
- Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai
- Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah

- Industri hilir sub sektor Perkebunan dan pemasarannya masih terbatas

2. Aspek Non Teknis

- Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
- Kapabilitas petani masih rendah
- Akses petani terhadap permodalan masih terbatas
- Budaya atau kebiasaan masyarakat petani
- Perubahan Iklim Global

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dari beberapa instansi pusat maupun daerah.

2.2.2.1. Telaah Isu Strategis Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari **delapan misi Presiden atau Asta Cita** yaitu :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan diseluruh wilayah dan dipantau

secara berkala. Oleh karena itu Kementerian Pertanian telah melakukan Pemetaan Kebijakan Lingkup Pangan dan dalam RPJMN 2025-2029. Dimana RPJMN 2025-2029 mencakup Program Unggulan yang mendukung Transformasi Pangan dan Pertanian. Adapun target Pembangunan Nasional 2029 yaitu :

1. Pendapatan Per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Peningkatan Daya Saing SDM
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju zero emission.

Sedangkan untuk Program – program unggulannya sebagai berikut :

- 1. Program Makan Bergizi Gratis**
- 2. Program Swasembada Pangan, Energi dan Air**
3. Program Pendidikan
4. Program Kesehatan
- 5. Program Hilirisasi**

Dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029 yaitu: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dan dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

***“PERTANIAN MAJU BERKELANJUTAN SERTA BERMANFAAT
BAGI RAKYAT INDONESIA***

Maka Kementrian Pertanian menetapkan kerangka strategis pertanian 2025-2029 sebagai berikut :

KERANGKA STRATEGIS PERTANIAN 2025-2029



2029 Kementerian Pertanian maka ditetapkan **Detail Indikator Struktur Program Prioritas Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian** diantaranya untuk lingkup Pertanian sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Level	Nama	Capaian	Target 2025
Indikator Sasaran KP	Produksi Kelapa Sawit	235.421.494	239.646.870
Indikator Sasaran KP	Produktivitas Kelapa	1,12	1,13
Indikator Sasaran KP	Produksi Kelapa	2.867.054	2.880.690
Indikator Sasaran KP	Produksi Kopi	774.961	780.957
Indikator Sasaran KP	Produksi Karet	2.717.081	2.496.364
Indikator Sasaran KP	Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	1,73	1,94

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan

Pertanian tersebut ditetapkan pula tiga klasifikasi kawasan pertanian yaitu Kawasan Pertanian Nasional, Kawasan Pertanian Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten. Selanjutnya berdasarkan ***Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional*** maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kawasan pertanian dengan komoditi kelapa sawit dan kelapa sebagaimana tabel berikut :

Provinsi	komoditas	Kab
JAMBI	karet	Kab. Batanghari
		Kab. Bungo
		Kab. Merangin
		Kab. Muaro Jambi
		Kab. Sarolangun
		Kab. Tebo
	kelapa	Kab. Tanjung Jabung Barat
		Kab. Tanjung Jabung Timur
	kelapa sawit	Kab. Batanghari
		Kab. Bungo
		Kab. Merangin
		Kab. Muaro Jambi
		Kab. Sarolangun
		Kab. Tanjung Jabung Barat
		Kab. Tanjung Jabung Timur
	kopi	Kab. Tebo
		Kab. Kerinci
		Kab. Merangin
		Kab. Tanjung J. Timur

2.2.2.2. Telaah Isu Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Visi RPJMN tahun 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sedangkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu : “ **Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,**

Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”. Jambi MANTAP dimaknai suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) Misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, serta
3. Memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2025 Gubernur Jambi mengangkat 3 (tiga) Isu Strategis yaitu Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, daya saing daerah serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ **Kekuatan (*strenghts*) :**

1. Tersedianya Sistem sarana dan prasarana (bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, PSPP, PSPHP, UPTDBPTP, UPTD-BPSBTP, UPTD-BPPBTP);
2. Tersedianya Sumber daya Manusia (Penyuluh, PPNS, PBT, Pengawas Pestisida, Petugas PUP, Brigade Karhutlah, tenaga teknis Pemetaan, tenaga Perencana, Fasda);
3. Tersedianya Laboratorium benih, OPT, dan APH, serta Lahan kebun dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
4. Tersedianya Regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Norma, Standar Operasional, dan Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi;

❖ **Kelemahan (*weakness*) :**

1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat;
3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ **Peluang (*opportunities*)**

1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan;
2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim;
3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial;
4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

❖ **Tantangan (*threats*):**

1. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis;
2. SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah;
3. Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;
4. Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

2.2.2.3. Telaah Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Isu-isu strategis yang menjadi acuan dan dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Isu strategis berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal, dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. **Faktor kekuatan utama** yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat adalah:

- Koordinasi lintas institusi
- Jumlah sumber daya aparatur
- Jumlah keanekaragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- Bertambahnya jumlah PPL

Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis internal. Faktor tersebut dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi penghambat bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Dalam peningkatan pelayanannya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi harus mampu meminimalkan pengaruh faktor ini, yaitu:

- Penggabungan 3 dinas menjadi 1 dinas
- Sarana dan Prasarana
- Pelaksana Teknis Lapangan
- Mutu Sumbledaya Aparatur

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek

dalam manajemen puncak. Berikut ini di uraikan sejumlah **peluang** utama yang dapat dimanfaatkan untuk memacu upaya peningkatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi :

- Potensi Sumber daya Alam
- Pemanfaatan Teknologi
- Peningkatan permintaan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- Tenaga Kerja
- Investasi

Selain memiliki sejumlah peluang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesungguhnya menghadapi sejumlah **tantangan** guna meningkatkan pelayanannya di Provinsi Jambi. Berikut ini dijelaskan secara singkat sejumlah tantangan utama dimaksud.

- Alih Fungsi Lahan
- Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas
- Degradasi lahan karena eksploitasi lahan yang berlebihan.
- Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air
- Kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak
- Tingginya resiko tertular penyakit hewan menular

Dengan memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dari beberapa instansi pusat maupun daerah serta dengan memperhatikan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi **Isu - Isu Strategis** antara lain yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan.

Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

I. Kekuatan (strenghts):

1. Tersedianya sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Standar Operasional dan Pedoman Teknis

II. Kelemahan (weakness):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan dan budidaya peternakan yang belum optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana Perkebunan dan Peternakan yang belum memadai;
3. Kurangnya ketersediaan indukan dan bibit ternak sebagai akseptor IB.
4. Kurangnya ketersediaan bibit unggul komoditi perkebunan yang bersertifikat.
5. Rusaknya tanggul – tanggul di lahan perkebnunan
6. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal.
7. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis

baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

I. Peluang (opportunities):

1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan dan populasi ternak masih dapat ditingkatkan.
2. Adanya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif.
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan hewan
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

II. Tantangan (threats):

1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih rendah
2. Alih fungsi lahan karet setiap tahun terus meningkat
3. Penguasaan teknologi perkebunan dan peternakan masih rendah
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi
5. Daya saing produk olahan perkebunan dan peternakan serta pemasaran masih terbatas
6. Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Dari berbagai isu strategi dan permasalahan yang ada baik ditingkat Perangkat Daerah, Provinsi maupun nasional dapat disimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Simpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Luas Lahan dan Produksi Komoditi Perkebunan	Kurangnya ketersediaan benih/bibit unggul (bersertifikat)	Alih Fungsi Lahan	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Belum optimalnya penggunaan benih unggul yang bermutu/bersertifikat
	Banyaknya tanaman tua/rusak					Luas tanaman tua dan rusak yang masih belum tertangani dengan baik
	Masih tingginya serangan OPT dan gangguan usaha Perkebunan	Degradasi lahan perkebunan				Adanya tanggul – tanggul yang rusak dilahan Perkebunan
	Minimnya sarana dan prasarana					

	SDM Petugas Perkebunan yang masih rendah					Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah
Sumber daya alam dan kondisi iklim yang mendukung pengembangan peternakan	Masih rendahnya SDM Peternak	Alih fungsi lahan	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Cuaca ekstrem akibat dampak perubahan iklim	Kapabilitas petani yang masih rendah
	Masih tingginya kematian pedet (anak sapi)					Pengembangan peternakan
	Minimnya ketersediaan Hijauan Pakan Ternak Unggul					Penyediaan Pakan Berkualitas
	Kurangya tenaga medis dan paramedis					Penanganan penyakit menular ternak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian **Misi kedua** dari RPJMD Kabupaten yaitu **Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dan **Misi ketiga** dari RPJMD Kabupaten yaitu **Berkah dalam upaya Peningkatan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang Berkelanjutan**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka **Tujuan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **"Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pekebun/Peternak) dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel"**.

3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dengan mengacu tujuan diatas maka sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya produksi komoditi perkebunan
2. Meningkatnya populasi ternak;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan petani/pekebun.
2. Peningkatan Populasi ternak secara optimal.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
- Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatkan Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton)	153.292	155.591	158.080	160.569	162.186	164.248	166.737	
			Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Karet) (Ton)	2.752	2.760	2.771	2.784	2.801	2.818	2.853	
			Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Dalam) (Ton)	55.224	55.610	56.054	56.558	57.180	57.808	58.436	
			Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kopi) (Ton)	1.128	1.131	1.135	1.141	1.149	1.157	1.163	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Pinang) (Ton)	14.047	14.173	14.314	14.471	14.645	14.820	14.995	
			Jumlah Populasi Ternak (Sapi) (Ekor)	6.448	6.577	6.708	6.843	6.980	7.119	7.258	
			Jumlah Populasi Ternak (Kerbau) (Ekor)	314	318	323	328	333	338	343	
			Jumlah Populasi Ternak (Kambing) (Ekor)	7.839	8.035	8.235	8.441	8.652	8.869	9.086	
			Jumlah Populasi Ternak (Domba) (Ekor)	125	128	130	133	135	138	141	
			Jumlah Populasi Ternak (Unggas) (Ekor)	1.023.044	1.035.463	1.048.056	1.060.827	1.073.778	1.086.913	1.100.234	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (*)	74,06	79,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	79,98	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	

3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dengan telah ditetapkannya tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan penahapan pembangunan dengan menentukan prioritas pembangunan tahunan pada Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang disajikan pada tabel dibawah berikut :

**Tabel 3.4. : Penahapan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ekonomi Maju (Peningkatan pertumbuhan ekonomi)				
Meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan melalui kegiatan-kegiatan : 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten /Kota 6. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 7. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengembangan industri pengolahan hasil melalui kegiatan-kegiatan : 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan sektor swasta besar melalui kegiatan-kegiatan : 1. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Mendorong adopsi teknologi pada sektor perkebunan dan peternakan melalui kegiatan-kegiatan : 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan	Penguatan ekosistem ekonomi yang tangguh, adaptif terhadap perubahan, dan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan : 1. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai

Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 4. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 5. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
--	---	---	---	---

3.5. Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 arah kebijakan pembangunan daerah disusun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan kondisi aman, tenteram, dan tertib, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sesuai arah kebijakan pada RPJMD tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan beberapa kebijakan dalam mendukung pelaksanaan Misi 3 yaitu **Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.**

Dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan inseminasi buatan, penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan penyediaan pelayanan kesehatan hewan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan melalui bantuan saprodi, alsintan dan peralatan teknologi.

5. Peningkatan hilirisasi komoditi perkebunan melalui penyediaan teknologi, penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
6. Peningkatan pengendalian dan pencegahan bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan serta penanganan dan pengendalian kebakaran lahan kebun.
7. Fasilitasi, pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha perkebunan.
8. Mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan dan peternakan yang baik melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran**, dan **Kebijakan** dari **RPJMD** Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap **Renstra** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut ini:

Tabel 3.5 : Rumusan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA 2025-2029	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.		1. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan 2. Pengembangan hilirisasi dan rantai nilai (value chain) produk unggulan. 3. Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal	1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan inseminasi buatan, penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan penyediaan pelayanan kesehatan hewan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan melalui bantuan saprodi, alsintan dan peralatan teknologi. 4. Peningkatan hilirisasi komoditi perkebunan melalui penyediaan teknologi, penerapan pasca panen dan	

			pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. 5. Peningkatan pengendalian dan pencegahan bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan serta penanganan dan pengendalian kebakaran lahan kebun. 6. Fasilitasi, pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha perkebunan. 7. Mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan dan peternakan yang baik melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.	
--	--	--	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tidak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

4.1. Urusan Program

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai sejumlah Program dan Kegiatan. Dalam Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

4.2. Urusan Kegiatan

Untuk melaksanakan program Renstra Tahun 2025-2029 maka diperlukan kegiatan – kegiatan yang mendukung dari program tersebut yaitu :

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijau Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- 3) Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

- 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner

12. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

13. Program Perizinan Usaha Pertanian

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

14. Program Penyuluhan Pertanian

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					20.983.655.395,00		23.715.936.488,00		26.647.842.549,00		30.361.477.315,00		34.085.324.723,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.966.318.320,00		12.086.106.487,00		13.198.145.045,00		15.095.165.696,00		16.736.595.693,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DISBUNAK)	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	10.966.318.320,00	100	12.086.106.487,00	100	13.198.145.045,00	100	15.095.165.696,00	100	16.736.595.693,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.633.856.275,00		6.549.090.752,00		7.482.296.217,00		8.551.070.931,00		9.737.689.299,00	
Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (Persentase)	4,28	6,48	7,28	5.633.856.275,00	8,08	6.549.090.753,00	8,88	7.482.296.216,00	9,68	8.551.070.933,00	10,48	9.737.689.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.952.416.600,00		2.268.587.250,00		2.733.704.963,00		3.104.796.233,00		3.514.730.136,00	

Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DISBUNAK)	PERSENTASE DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN (%)	20	21	22	1.952.416.600,00	23	2.268.587.250,00	24	2.733.704.963,00	25	3.104.796.233,00	26	3.514.730.135,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.075.427.701,00		1.247.408.984,00		1.439.520.331,00		1.552.948.381,00		1.742.948.381,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (DISBUNAK)	PERSENTASE TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) (%)	10	11	12	1.075.427.701,00	13	1.247.408.984,00	14	1.439.520.331,00	15	1.552.948.381,00	16	1.742.948.381,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					241.201.622,00		277.381.865,00		318.989.145,00		366.837.517,00		406.837.517,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DISBUNAK)	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	241.201.622,00	100	277.381.865,00	100	318.989.145,00	100	366.837.517,00	100	406.837.517,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					500.112.259,00		575.129.098,00		661.398.463,00		760.608.232,00		874.699.467,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian (DISBUNAK)	PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (%)	100	100	100	500.112.259,00	100	575.129.098,00	100	661.398.463,00	100	760.608.232,00	100	874.699.467,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					614.322.617,00		712.232.052,00		813.788.386,00		930.050.324,00		1.071.824.230,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DISBUNAK)	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	20	21	22	614.322.617,00	23	712.232.052,00	24	813.788.386,00	25	930.050.324,00	26	1.071.824.230,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					20983655395,00		23715936488,00		26647842549,00		30361477315,00		34085324723,00	

**Tabel 4.2. : TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatkan Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berkbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan			Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton)		
					Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Karet) (Ton)		
					Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Dalam) (Ton)		
					Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Kopi) (Ton)		
					Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Pinang) (Ton)		
		Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan dan Pernakanan			PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Meningkatnya Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(satu) daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DISBUNAK)		PERSENTASE DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
						3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Jumlah pembangunan prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan/peternakan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian		3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
						3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Jumlah laporan pengelolaan wilayah sumber bibit/ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DISBUNAK)		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
						3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian (DISBUNAK)		PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) yang dimiliki pekebun	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota		3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) yang dimiliki pekebun	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			pertanian (DISBUNAK)	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
		Meningkatnya Populasi Ternak			Jumlah Populasi Ternak (Sapi) (Ekor)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Populasi Ternak (Kerbau) (Ekor)		
					Jumlah Populasi Ternak (Kambing) (Ekor)		
					Jumlah Populasi Ternak (Domba) (Ekor)		
					Jumlah Populasi Ternak (Unggas) (Ekor)		
			Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Meningkatnya Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Baru	
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DISBUNAK)		PERSENTASE DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
						3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Jumlah pembangunan prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan/peternakan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
						3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian		3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Jumlah laporan pengelolaan wilayah sumber bibit/ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan		PERSENTASE TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kesehatan masyarakat veteriner (DISBUNAK)	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah/Kabupaten/Kota		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
						3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
						3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner		3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DISBUNAK)		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP OPD (*)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			pemerintahan dan pelayanan publik (DISBUNAK)		Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.27.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Urusan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Tahun 2025-2029 maka diperlukan rencana pendanaan yang mendukung dari program/kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu :

**Tabel 4.3 : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat**

TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM/OUTCOM E/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BIDANG PERTANIAN																		
Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pekebun/ Peternak) dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	PERSENTASE PEMENUHAN KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	100%	100%	10.926.340.300	100%	10.966.318.320	100%	12.086.106.487	100%	13.198.145.045	100%	15.095.165.696	100%	16.736.595.693	Kab. Tanjung Barat
				PERSENTASE PEMENUHAN KOMPONEN SKM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	26 dokumen	26 dokumen	473.375.200	25 dokumen	544.381.480	25 dokumen	626.038.702	25 dokumen	719.944.507	25 dokumen	827.936.183	25 dokumen	952.126.611	Kab. Tanjung Barat
		3. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	18 dokumen	75.806.600	18 dokumen	87.177.590	18 dokumen	100.254.229	18 dokumen	115.292.363	18 dokumen	132.586.217	18 dokumen	152.474.150
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	37.825.600	1 dokumen	43.499.440	1 dokumen	50.024.356	1 dokumen	57.528.009	1 dokumen	66.157.211	1 dokumen	76.080.792	Kab. Tanjung Barat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	164.543.000	3 laporan	189.224.450	3 laporan	217.608.118	3 laporan	250.249.335	3 laporan	287.786.735	3 laporan	330.954.746	Kab. Tanjung Barat
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Tersedianya Data Sektoral yang berkualitas	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 data	2 data	146.700.000	2 data	168.705.000	2 data	194.010.750	2 data	223.112.363	2 data	256.579.217	2 data	295.066.099	Kab. Tanjung Barat
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 berita acara	2 berita acara	48.500.000	1 berita acara	55.775.000	1 berita acara	64.141.250	1 berita acara	73.762.438	1 berita acara	84.826.803	1 berita acara	97.550.824	Kab. Tanjung Barat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	6.135.196.000	1 laporan	6.781.790.625	1 laporan	7.426.969.688	1 laporan	8.169.666.656	1 laporan	8.986.633.322	1 laporan	9.885.296.654	Kab. Tanjung Barat	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35 orang/bulan	5.561.445.300	35 orang/bulan	6.117.589.830	35 orang/bulan	6.729.348.813	35 orang/bulan	7.402.283.694	35 orang/bulan	8.142.512.064	35 orang/bulan	8.956.763.270	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	443.800.000	1 dokumen	488.180.000	1 dokumen	536.998.000	1 dokumen	590.697.800	1 dokumen	649.767.580	1 dokumen	714.744.338	Kab. Tanjab Barat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	68.450.200	1 dokumen	75.295.220	1 dokumen	82.824.742	1 dokumen	91.107.216	1 dokumen	100.217.938	1 dokumen	110.239.732	Kab. Tanjab Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan koordinasi dan laporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	61.500.500	1 laporan	70.725.575	1 laporan	77.798.133	1 laporan	85.577.946	1 laporan	94.135.740	1 laporan	103.549.314	Kab. Tanjab Barat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	317.201.500	1 laporan	364.781.725	1 laporan	419.498.984	1 laporan	618.443.518	1 laporan	711.210.046	1 laporan	817.891.553	Kab. Tanjab Barat
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	121.000.500	1 laporan	139.150.575	1 laporan	160.023.161	1 laporan	320.046.323	1 laporan	368.053.271	1 laporan	423.261.262	Kab. Tanjab Barat
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	111.450.500	1 laporan	128.168.075	1 laporan	147.393.286	1 laporan	169.502.279	1 laporan	194.927.621	1 laporan	224.166.764	Kab. Tanjab Barat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	84.750.500	1 laporan	97.463.075	1 laporan	112.082.536	1 laporan	128.894.917	1 laporan	148.229.154	1 laporan	170.463.527	Kab. Tanjab Barat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	207.700.800	100 %	238.855.920	100 %	274.684.308	100 %	315.886.954	100 %	363.269.997	100 %	417.760.497	Kab. Tanjab Barat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	42.500.300	1 unit	48.875.345	1 unit	56.206.647	1 unit	64.637.644	1 unit	74.333.290	1 unit	85.483.284	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhi kebutuhan pakaian dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	88.400.500	1 paket	101.660.575	1 paket	116.909.661	1 paket	134.446.110	1 paket	154.613.027	1 paket	177.804.981	Kab. Tanjab Barat
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	76.800.000	1 dokumen	88.320.000	1 dokumen	101.568.000	1 dokumen	116.803.200	1 dokumen	134.323.680	1 dokumen	154.472.232	Kab. Tanjab Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan umum perangkat daerah	100%	100%	755.251.800	100%	868.539.570	100%	998.820.506	100%	1.148.643.581	100%	1.320.940.119	100%	1.519.081.136	Kab. Tanjab Barat

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	14.600.700	1 paket	16.790.805	1 paket	19.309.426	1 paket	22.205.840	1 paket	25.536.716	1 paket	29.367.223	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	75.200.000	1 paket	86.480.000	1 paket	99.452.000	1 paket	114.369.800	1 paket	131.525.270	1 paket	151.254.061	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	37.600.400	1 paket	43.240.460	1 paket	49.726.529	1 paket	57.185.508	1 paket	65.763.335	1 paket	75.627.835	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	32.400.000	1 paket	37.260.000	1 paket	42.849.000	1 paket	49.276.350	1 paket	56.667.803	1 paket	65.167.973	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	9.450.000	1 dokumen	10.867.500	1 dokumen	12.497.625	1 dokumen	14.372.269	1 dokumen	16.528.109	1 dokumen	19.007.325	Kab. Tanjab Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	543.200.700	1 laporan	624.680.805	1 laporan	718.382.926	1 laporan	826.140.365	1 laporan	950.061.419	1 laporan	1.092.570.632	Kab. Tanjab Barat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	42.800.000	1 dokumen	49.220.000	1 dokumen	56.603.000	1 dokumen	65.093.450	1 dokumen	74.857.468	1 dokumen	86.086.088	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.585.200.000	100%	575.950.000	100%	562.840.000	100%	222.292.000	100%	686.371.200	100%	697.348.320	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	3 unit	126.500.000	7 unit	315.000.000	-	-	2 unit	88.000.000	1 unit	370.000.000	1 unit	370.000.000	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 unit	164.000.000	-	-	1 unit	380.000.000	-	-	5 unit	164.000.000	5 unit	164.000.000	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel untuk penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	1 paket	16.500.000	1 paket	18.400.000	1 paket	18.800.000	1 paket	19.100.000	1 paket	21.200.000	1 paket	21.200.000	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	6 unit	72.000.000	5 unit	86.400.000	5 unit	95.040.000	5 unit	99.792.000	5 unit	109.771.200	5 unit	120.748.320	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit gedung kantor	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjab Barat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	8 unit	6.200.000	13 unit	102.150.000	31 unit	34.500.000	3 unit	15.400.000	3 unit	21.400.000	3 unit	21.400.000	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 unit	54.000.000	1 unit	34.500.000	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	929.335.000	100 %	1.027.923.500	100 %	1.131.096.500	100 %	1.244.643.898	100 %	1.369.611.697	100 %	1.507.151.788	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	6.620.000	1 laporan	7.613.000	1 laporan	8.754.950	1 laporan	10.068.193	1 laporan	11.578.421	1 laporan	13.315.185	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	106.480.000	1 laporan	122.452.000	1 laporan	134.697.200	1 laporan	148.166.920	1 laporan	162.983.612	1 laporan	179.281.973	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan pertengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	54.235.000	1 laporan	59.658.500	1 laporan	65.624.350	1 laporan	72.186.785	1 laporan	79.405.464	1 laporan	87.346.010	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	762.000.000	1 laporan	838.200.000	1 laporan	922.020.000	1 laporan	1.014.222.000	1 laporan	1.115.644.200	1 laporan	1.227.208.620	Kab. Tanjab Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	523.080.000	100 %	594.095.500	100 %	646.157.800	100 %	758.623.930	100 %	829.193.132	100 %	939.939.134	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	21 unit	121.650.000	21 unit	139.897.500	21 unit	160.882.125	21 unit	185.014.444	21 unit	212.766.610	21 unit	244.681.602	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	18 unit	138.580.000	18 unit	159.367.000	18 unit	183.272.050	18 unit	210.762.858	18 unit	242.377.286	18 unit	278.733.879	Kab. Tanjab Barat

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit	36.450.000	32 unit	41.917.500	32 unit	48.205.125	32 unit	55.435.894	32 unit	63.751.278	32 unit	73.313.969	Kab. Tanjab Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2 unit	186.230.000	2 unit	204.853.000	1 unit	225.338.300	2 unit	247.872.130	1 unit	272.659.343	1 unit	299.925.277	Kab. Tanjab Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	21.520.000	1 unit	24.748.000	1 unit	28.460.200	1 unit	32.729.230	1 unit	37.638.615	1 unit	43.284.407	Kab. Tanjab Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	18.650.000	1 unit	23.312.500	-	-	1 unit	26.809.375	-	-	-	-	Kab. Tanjab Barat
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	MENINGKATKAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	4,28%	6,48%	3.194.296.950	7,28%	5.633.856.275	8,08%	6.549.090.752	8,88%	7.482.296.217	9,68%	8.551.070.931	10,48%	9.737.689.299	Kab. Tanjab Barat
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %	100 %	582.790.000	100 %	1.330.921.040	100 %	1.464.013.144	100 %	1.610.414.458	100 %	1.771.455.904	100 %	1.948.601.495	Kab. Tanjab Barat
Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 laporan	1 laporan	582.790.000	1 laporan	648.210.520	1 laporan	713.031.572	1 laporan	784.334.729	1 laporan	862.768.202	1 laporan	949.045.022	Kec. Tungkal Ilir, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan dan Kuala Betara
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	1 laporan	338.210.520	1 laporan	372.031.572	1 laporan	409.234.729	1 laporan	450.158.202	1 laporan	495.174.022	Kec. Tungkal Ilir, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan dan Kuala Betara
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	-	-	18.150 btg	344.500.000	19.965 btg	378.950.000	21.962 btg	416.845.000	24.158 btg	458.529.500	26.574 btg	504.382.450	Kec. Betara
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	Persentase Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	100 %	100 %	711.506.950	100 %	991.323.630	100 %	1.286.724.264	100 %	1.514.775.410	100 %	1.781.042.729	100 %	2.066.487.569	Kab. Tanjab Barat

Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	Terlaksananya peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan	1 dokumen	1 dokumen	293.456.300	1 dokumen	440.873.850	1 dokumen	507.004.928	1 dokumen	583.055.667	1 dokumen	670.514.017	1 dokumen	770.514.017	Kab. Tanjab Barat
Pemanfaatan SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	278.368.150	1 dokumen	334.041.780	1 dokumen	400.850.136	1 dokumen	481.020.163	1 dokumen	577.224.196	1 dokumen	692.669.035	Desa Bunga Tanjung Kec. Betara, Desa Tanjung Paku Kec. Mertung dan Desa Terjun Gajah Kec. Betara
Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG (Sumber Daya Genetik) tanaman	Terlaksananya Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	139.682.500	3 VUB	216.408.000	3 VUB	378.869.200	3 VUB	450.699.580	3 VUB	533.304.517	3 VUB	603.304.517	Kec. Betara, Kec. Pengabuan dan Kec. Tungkal Ilir
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	-	-	-	4,73 ton	302.620.000	4,96 ton	348.013.000	5,20 ton	400.214.950	5,47 ton	460.247.193	5,71 ton	520.247.193	Kab. Tanjab Barat
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Tersedianya penjaminan peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	-	-	-	4,73 ton	302.620.000	4,96 ton	348.013.000	5,20 ton	400.214.950	5,47 ton	460.247.193	5,71 ton	520.247.193	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.426 ekor	100 %	1.900.000.000	100 %	3.008.991.605	100 %	3.450.340.345	100 %	3.956.891.398	100 %	4.538.325.105	100 %	5.202.353.043	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,25 ton	0,25 ton	20.000.000	0,5 ton	102.620.000	0,8 ton	118.013.000	0,8 ton	135.714.950	0,8 ton	156.072.193	0,8 ton	176.072.193	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.426 ekor	2.500 ekor	1.880.000.000	3.600 ekor	2.706.371.605	3.850 ekor	3.112.327.345	3.850 ekor	3.579.176.448	3.850 ekor	4.116.052.913	3.850 ekor	4.733.460.851	Kab. Tanjab Barat
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	4.000 dosis	200.000.000	4.000 dosis	220.000.000	4.000 dosis	242.000.000	4.000 dosis	266.200.000	4.000 dosis	292.820.000	Kab. Tanjab Barat
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	20%	21%	889.721.750	22%	1.952.416.600	23%	2.268.587.250	24%	2.733.704.963	25%	3.104.796.234	26%	3.514.730.136	Kab. Tanjab Barat
Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	100%	691.532.500	100%	748.570.535	100%	860.856.115	100%	989.984.533	100%	1.138.482.212	Kec. Pengabuan, Senyerang, Kuala Betara, Betara, Bram Itam, Seberang Kota dan Tungkal Ilir

Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	1 laporan	158.550.000	1 laporan	182.332.500	1 laporan	209.682.375	1 laporan	241.134.731	1 laporan	277.304.941	Kec. Tungkal Ilir, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan, Senyerang dan Kuala Betara
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Tertaksananya pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian	Luas Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	0	-	-	150 ha	532.982.500	175 ha	566.238.035	200 ha	651.173.740	225 ha	748.849.801	250 ha	861.177.271	Kab. Tanjab Barat
Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan/peternakan	58 unit	100 %	759.191.500	100 %	1.107.319.100	100 %	1.343.416.965	100 %	1.669.759.135	100 %	1.881.258.532	100 %	2.112.694.754	Kab. Tanjab Barat
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Tertaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	1 unit	150.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	476.728.500	1 unit	528.762.552	1 unit	578.762.552	Kec. Bram Itam, Kuala Betara, Betara, Tungkal Ilir, Seberang Kota, Pengabuan, Senyerang
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tertaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 unit	7 unit	354.234.000	10 unit	607.369.100	12 unit	698.474.465	14 unit	803.245.635	16 unit	923.732.480	18 unit	1.062.292.352	Kab. Tanjab Barat
Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Tertaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	28 unit	10 unit	254.957.500	10 unit	299.950.000	10 unit	344.942.500	10 unit	389.785.000	10 unit	428.763.500	10 unit	471.639.850	Kec. Bram Itam, Kuala Betara, Betara, Tungkal Ilir, Seberang Kota, Pengabuan
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit/ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	5 laporan	100%	130.530.250	100%	153.565.000	100%	176.599.750	100%	203.089.713	100%	233.553.169	100%	263.553.169	Kab. Tanjab Barat
Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Tertaksananya Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5 laporan	1 laporan	130.530.250	1 laporan	153.565.000	1 laporan	176.599.750	1 laporan	203.089.713	1 laporan	233.553.169	1 laporan	263.553.169	Kab. Tanjab Barat
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)	10%	11%	739.729.931	12%	1.075.427.701	13%	1.247.408.984	14%	1.439.520.331	15%	1.552.948.381	16%	1.742.948.381	Kab. Tanjab Barat
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah/Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah/Kabupaten/Kota	100%	100%	592.592.106	100%	657.937.225	100%	756.627.809	100%	870.121.980	100%	900.640.277	100%	1.000.640.277	Kab. Tanjab Barat

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 laporan	1 laporan	592.592.106	1 laporan	657.937.225	1 laporan	756.627.809	1 laporan	870.121.980	1 laporan	900.640.277	1 laporan	1.000.640.277	Kab. Tanjab Barat
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	5 laporan	100%	48.191.115	100%	51.082.582	100%	53.830.711	100%	61.905.318	100%	71.191.115	100%	81.191.115	Kab. Tanjab Barat
Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terlaksananya Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	5 laporan	1 laporan	48.191.115	1 laporan	51.082.582	1 laporan	53.830.711	1 laporan	61.905.318	1 laporan	71.191.115	1 laporan	81.191.115	Kab. Tanjab Barat
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 laporan	100 %	98.946.710	100 %	116.407.894	100 %	136.950.464	100 %	157.493.034	100 %	181.116.989	1 laporan	211.116.989	Kab. Tanjab Barat
Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Terlaksananya Penyediaan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 laporan	1 laporan	98.946.710	1 laporan	116.407.894	1 laporan	136.950.464	1 laporan	157.493.034	1 laporan	181.116.989	1 laporan	211.116.989	Kab. Tanjab Barat
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	-	-	-	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	Kab. Tanjab Barat
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000	Kab. Tanjab Barat
PRPGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN	100%	100%	220.391.622	100%	241.201.622	100%	277.381.865	100%	318.989.145	100%	366.837.517	100%	406.837.517	Kab. Tanjab Barat
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1150 Ha	230 Ha	220.391.622	230 Ha	241.201.622	230 Ha	277.381.865	230 Ha	318.989.145	230 Ha	366.837.517	230 Ha	406.837.517	Kab. Tanjab Barat
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang dikendalikan	1000 ha	200 ha	86.566.622	200 ha	100.776.622	200 ha	115.893.115	200 ha	133.277.083	200 ha	153.268.645	200 ha	173.268.645	Kab. Tanjab Barat
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	30 ha	133.825.000	30 ha	140.425.000	30 ha	161.488.750	30 ha	185.712.063	30 ha	213.568.872	30 ha	233.568.872	Kab. Tanjab Barat

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN	100%	100%	154.649.874	100%	500.112.259	100%	575.129.098	100%	661.398.463	100%	760.608.232	100%	874.699.467	Tanjung Jabung Barat
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) yang dimiliki pekebun	4.796 Ha	350 STDB	154.649.874	750 STDB	500.112.259	750 STDB	575.129.098	750 STDB	661.398.463	750 STDB	760.608.232	750 STDB	874.699.467	Tanjung Jabung Barat
Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 dokumen	1 dokumen	154.649.874	1 dokumen	500.112.259	1 dokumen	575.129.098	1 dokumen	661.398.463	1 dokumen	760.608.232	1 dokumen	874.699.467	Tanjung Jabung Barat
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN	20%	21%	408.016.071	22%	503.816.283	23%	712.232.052	24%	813.788.386	25%	930.050.324	26%	1.071.824.230	Kab. Tanjab Barat
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	35 unit	100 %	408.016.071	100 %	503.816.283	100 %	712.232.052	100 %	813.788.386	100 %	930.050.324	100 %	1.071.824.230	Tanjung Jabung Barat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	30 Unit	130.007.452	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanjung Jabung Barat
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Terlaksananya Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 unit	6 unit	320.768.571	11 unit	277.836.581	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanjung Jabung Barat
Penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terlaksananya Penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit	2 unit	87.247.500	2 unit	95.972.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanjung Jabung Barat
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	-	-	-	-	-	21 unit	476.655.125	21 unit	554.653.766	21 unit	645.002.242	21 unit	758.271.340	Tanjung Jabung Barat
Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	2 unit	235.576.927	2 unit	259.134.620	2 unit	285.048.082	2 unit	313.552.890	Tanjung Jabung Barat
Jumlah Anggaran					16.533.146.498	-	20.873.149.060	-	23.715.936.488	-	26.647.842.549	-	30.361.477.315	-	34.085.324.722	

4. 4. Urusan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, di mana prioritas program tersebut yang menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian khususnya sektor perkebunan dan peternakan ada pada Misi ke III yaitu **Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan** yang memiliki tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029. Dari program-program prioritas pembangunan daerah maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendukung **program unggulan** antara lain sebagai berikut :

1. Program hilirisasi komoditi unggulan daerah

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI dan Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (KOPEK) agar bisa membangun pabrik pengolahan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan luas lahan dan potensi kelapa dalam yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan untuk hilirisasi komoditi pinang tahun 2025 telah dilakukan proses Legalitas dari Indikasi Geografis (IG) terhadap komoditi pinang dan diharapkan melalui Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis (MPIG) Pinang diharapkan produk – produk yang telah dibuat seperti obat kumur dan permen bisa berkembang melalui MPIG dan UMKM.

2. Program mengakomodir 1 usulan prioritas Musrenbang Desa/kelurahan per desa/kelurahan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mendukung program ini. Program untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Melalui musrenbang ini diharapkan desa dan kecamatan bisa mengusulkan kegiatan pengembangan ternak atau bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pasca panen dan hilirisasi sektor perkebunan dan peternakan.

3. Program pengembangan peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan ekonomi berbasis perdesaan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sub-sektor peternakan, baik secara tradisional maupun komersial, dengan didukung oleh ketersediaan lahan, bahan pakan alami, dan minat masyarakat terhadap usaha ternak. Melalui pengembangan ternak ini diharapkan bisa mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap kecamatan dan desa.

Adapun target pengembangan ternak setiap tahunnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Indikator	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah bantuan bibit ternak	2500	3600	3850	3850	3850

4. Program perbaikan tanggul dan normalisasi parit.

Meskipun pelaksanaan kegiatan perbaikan tanggul dan normalisasi parit bukan berada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap melakukan pendataan dan survey kelapangan terhadap dampak kerusakan yang terjadi. Rusaknya tanggul dan parit disekitar lahan perkebunan mengakibatkan banyaknya tanaman perkebunan yang rusak seperti lahan perkebunan pinang, kelapa dalam dan kopi. Hal ini tentunya berdampak pada rendahnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.

Selanjutnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mendukung program unggulan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Mendukung pelaksanaan **Makan Bergizi Gratis (MBG)** dengan memberikan bantuan hibah ternak kepada kelompok tani berupa Pengadaan ternak sapi, kambing dan unggas (ayam, itik dan burung puyuh).
- Mendukung **Pengentasan Kemiskinan** dengan memberikan bantuan hibah kepada kelompok tani ataupun masyarakat miskin berupa bantuan ternak unggas.
- Mendukung **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** melalui kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pertanian berkelanjutan dengan

sesuai tata ruang yang lebih baik serta tidak adanya pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat yang dilakukan di kawasan hutan.

- Mendukung **Universal Coverage Jamsostek (UCJ)** melalui kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit yang mengakomodir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mendukung **Integrasi Ternak dengan Lahan Perkebunan** melalui kegiatan memanfaatkan rumput di lahan kebun kelapa sawit menjadi sumber pakan ternak sapi.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah terkait daftar sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 4.4. : Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DISBUNAK)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

			3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	BERTAHAP Lokasi : Kec. Tungkal Ilir, Bram Itam Seberang Kota, Kuala Betara, Betara, Pengabuan dan Senyerang (Pengadaan Pupuk NPK Tablet pada tanaman kelapa dan Pupuk Organik Cair pada tanaman kopi dalam rangka peningkatan produksi - Desa Sungai Gebar dan Betara Kanan Kec. Kuala Betara, Desa Jati Mas dan Kemuning Kec. Bram Itam, Desa Tungkal IV Desa Kec. Seberang Kota, Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir, Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan, Desa Mekar Jaya, Teluk Kulbi, Sungai Terap dan Makmur Jaya Kec. Betara. (termasuk desa – desa lain dalam wilayah 7 kecamatan yaitu Kec. Tungkal Ilir, Bram Itam Seberang Kota, Betara, Kuala Betara, Pengabuan, Senyerang)
			3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Lokasi : Kec. Betara
			3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	

			dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	BERTAHAP : Lokasi : Kab. Tanjab Barat
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	BERTAHAP : Lokasi : Kab. Tanjab Barat
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	BERTAHAP : Lokasi : Kab. Tanjab Barat Desa Dataran Kempas, Kel. Tebing Tinggi, Desa Purwodadi, Desa Teluk Pengkah, Desa Sungai Keruh, Desa Kelagian Kec. Tebing Tinggi. Desa Tanjung Tayas, Pematang Tembesu, Taman Raja dan Badang Sepakat Kec. Tungka Ulu, Desa Sungai Penoban dan Desa Rawang Kempas Kec. Batang Asam, Desa Sungai Muluk Kec. Muara Papalik Desa Teluk Sialang Kec. Tungkal Ilir, Desa Kuala Indah Kec. Kuala Betara, Desa Mekar Tanjung Kec. Bram Itam, Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan, Desa Sungsang, Desa Sungai Kepayang Kec. Senyerang, Desa Mekar Jaya Kec. Betara, Desa Teluk Pulau Raya Kec. Seberang Kota
3.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	BERTAHAP : Lokasi Wilayah perkebunan kelapa dalam, pinang dan kopi Kab. Tanjung Jabung Barat (untuk komoditas kelapa sawit melalui anggaran dari BPDP)

		pertanian (DISBUNAK)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	BERTAHAP : Pengadaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan seperti Pengadaan Seng untuk Lantai Jemur Pinang Lokasi : Desa Tungkal IV Desa, Desa Tungkal V, Desa Kuala Baru Kec. Seberang Kota, Desa Kuala Indah, Desa Tanjung Pasir Kec. Kuala Betara, Desa Tungkal II Kec. Tungkal Ilir, Desa Mekar Tanjung Kec. Bram Itam, Desa Teluk Kulbi, Desa Sungai Terap Kec. Betara
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	BERTAHAP Pengadaan Pipa Paralon Lokasi : Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Dungun, Kel, Betara Kiri Kec. Kuala Betara, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar , Desa Kuala Baru Kec. Seberang Kota, Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir
4.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (DISBUNAK)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DISBUNAK)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

4.5. Target Pencapaian Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu. Sejalan dengan Visi, Misi dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perkebuna dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel 4.5 dibawah berikut :

Tabel 4.5. : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton							
	1. Kelapa Sawit		153.292	155.591	158.080	160.569	162.186	164.248	CPO
	2. Karet		2.752	2.760	2.771	2.784	2.801	2.818	Slab
	3. Kelapa Dalam		55.224	55.610	56.054	56.558	57.180	57.808	Kopra
	4. Kopi		1.128	1.131	1.135	1.141	1.149	1.157	Kopi Berasan
	5. Pinang		14.047	14.173	14.314	14.471	14.645	14.820	Biji Kering
2.	Jumlah Populasi Ternak	Ekor							
	1. Sapi		6.448	6.577	6.708	6.843	6.980	7.119	
	2. Kerbau		314	318	323	328	333	338	
	3. Kambing		7.839	8.035	8.235	8.441	8.652	8.869	
	4. Domba		125	128	130	133	135	138	
	5. Unggas		1.023.044	1.035.463	1.048.056	1.060.827	1.073.778	1.086.913	
3.	Nilai Akip OPD		74,06	79,00	81,00	81,50	82,00	82,50	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,98	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan menilai capaian seperangkat **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing – masing daerah. Capaian setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap urusan tersebut akan menunjukkan seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan Pemerintah kepada setiap daerah.

Dengan dilakukannya evaluasi ini, maka setiap daerah akan didorong untuk melaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yang dilaksanakannya sesuai dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator kinerja kunci ini akan dituangkan dalam berbagai laporan pelaksanaan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada Pemerintah, terutama dalam Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Sejalan dengan pelaporan LPPD setiap tahunnya untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan IKK sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6. : Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	5	5,5	6	6,5	7	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
2.	Produktivitas Komoditi Perkebunan per hektar per tahun - Kelapa Sawit (rakyat) - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang	Kg/Ha/thn	2.608 502 1.365 560 1.448	2.610 504 1.370 565 1.455	2.615 506 1.375 570 1.463	2.620 508 1.380 580 1.471	2.625 510 1.385 590 1.479	Mengukur produktivitas komoditi perkebunan (Wujud Produksi : Kelapa sawit = CPO, Karet = Slab, Kelapa dalam = Kopra, Kopi = kopi berasan, Pinang = Biji Kering)

Keterangan :

- Penghitungan IKK untuk Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kasus tahun ini} - \text{Jumlah kasus tahun lalu}}{\text{Jumlah kasus tahun lalu}} \times 100 \%$$
- Penghitungan IKK untuk Produktivitas Komoditi Perkebunan per hektar per tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Produksi perkebunan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100 \%$$

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas yang memuat **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan** merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum OPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta

rencana - rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Kuala Tungkal, 04 Desember 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. RIDUWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19740306 200012 1 001